

# Episode Kunci Drama Politik Dalam Konteks Keamanan

Ilham Prisgunanto\*

## Abstrak

*Fenomena baru yang muncul pada keriaan Pemilu 2014 adalah pemilih (voter) masih sanksi dan kurang percaya dengan Partai Politik di Indonesia. Buruknya berita politik memunculkan rasa muak dan ketidakpercayaan yang berlebihan pada pelaku Parpol. Namun di lain sisi karena tingkat kebutuhan yang tinggi dalam memilih, maka yang muncul adalah perasaan harus memilih salah satu Parpol apalagi adanya tekanan wajib memilih dan haram hukumnya menjadi Golput (Golongan Putih) dari Majelis agama semakin membuat orang tertekan dan terpuruk. Alhasil yang muncul adalah pola transaksional yang ada antara pemilih (voter) dengan yang dipilih (kandidat). Dalam kajian teori Konvergensi Simbolik jelas episode kunci akan mengerucut pada saga-saga (hikayat) yang akan merangkai narasi yang akan membuai orang. Hikayat yang ada akan membawa nuansa-nuansa kelokalan daerah dan ini bisa menjadi potensi konflik besar dalam penerapan pesta demokrasi dan bila polisi bisa menjadi menanganikan akan menjadi bumerang sosok keburukan institusi bukan pada pelaksanaan pemilu oleh KPU dan BAWASLU. Polri harus mewaspadai ini dalam penanganan keamanan dalam negeri menyikapi kisah dan episode kunci tadi.*

**Kata Kunci :** *Episode kunci, transaksional, jual beli, konvergensi simbolik, voter*

## A. Latar Belakang

Pada tahun 2014 ini dunia politik Indonesia diramaikan dengan pelaksanaan keriaan lima tahunan Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Presiden. Sudah dapat dipastikan Republik ini akan memiliki anggota Legislatif, Presiden dan calon Wakil Presiden baru. Proses suksesi yang sedemikian rumit dan alot ini tentu saja menarik bila dikaji dalam beberapa pandangan

komunikasi politik dalam konteks penerapan politik praktis yang ada. Tentu saja kedewasaan berpikir dan etika berpolitik yang sebenarnya akan mencerminkan bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi yang dilakukan di Indonesia ini. Peristiwa Pemilu akan memberikan pelajaran dan tingkat melek politik pada bangsa Indonesia ke depan. Pada prosesnya pendidikan politik ini akan memberikan kedewasaan berpikir pada masyarakat sebagai pemilih. Dapat terlaksananya Pemilu dengan lancar dan aman menandakan keberhasilan pada penerapan demokrasi sesungguhnya pada masyarakat.

\* Dr. Ilham Prisgunanto, adalah pengajar tetap Komunikasi Sosial untuk program strata satu dan strata dua STIK-PTIK dan penulis buku Komunikasi Pemasaran Era Digital, email : prisgunanto@gmail.com

Titik sentral dari tujuan pelaksanaan Pemilu jelas terletak pada kedewasaan berpolitik rakyat yang menunjukkan sikap mumpuni dan pemahaman sesungguhnya pada arti dan makna kebebasan. Hak memilih adalah bentuk pelaksanaan kewajiban sesungguhnya dari mandat terbesar rakyat kepada Negeranya. Ketika hak memilih itu tidak digunakan dapat dipastikan adanya kemandekan pada saluran apresiasi politik bangsa dan Negara yang ada saat ini. Ketika kebebasan terkekang dan hak memilih dibungkam maka yang terjadi adalah kemunduran dan keterbelakangan proses politik. Oleh sebab itu tidak heran bila rakyat banyak yang tidak memilih atau menjadi Golput (Golongan Putih) sudah dapat dipastikan ada yang bermasalah dalam saluran politik di Negara tersebut.

Kondisi sedemikian bukanlah sesuatu yang wajar tetapi perlu diwaspadai, bisa jadi itu adalah bentuk realisasi kekecewaan dan kebencian dari rakyat sebagai pemilih pada penyelenggaraan Pemilu atau pada representasi peserta Pemilu yang dianggap tidak layak dan pantas untuk dipilih atau sekedar menduduki kursi jabatan yang ada. Rakyat tidak akan banyak memberikan klaim pada tindakan politik mereka, hanya ditunjukkan dengan tidak mau memilih dalam Pemilu. Akar permasalahan ini jelas terletak pada Parpol sebagai mesin politik yang bisa memberikan aspirasi dan sarana jalan menyalurkan suara rakyat yang mandek. Rendahnya tingkat kepercayaan pada Parpol adalah penjelasan mudah dari titik tolak rangkaian permasalahan yang panjang tadi.

Buruknya citra Parpol sedemikian lekat saat ini dengan kekisruhan dunia politik dalam kehidupan kenegaraan. Parpol 'anu' sebagai pelaku korup dan penyelewengan juga aksi penangkapan oleh aparat semakin menambah panjang kebencian rakyat pada pelaku politik yang membawa warna dari Parpol tersebut. Berdasarkan hasil survei *Political Communication*

*Institute (Polcomm Institute)* mayoritas publik tidak mempercayai partai politik (parpol). Publik yang tidak percaya parpol yaitu sebesar 58,2 persen. Kemudian yang menyatakan percaya 26,3 persen, dan menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen. Tingkat kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh krisis yang dialami sejumlah partai politik (availabel at <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/09/1551505/Survei.Mayoritas.Publik.Tak.Percaya.Partai.Politik> [ditelusur 20/5/2014, 21:20.23]). Penyebab lain krisis parpol adalah konflik internal partai yang muncul di publik dan juga pelanggaran etika yang dilakukan kader parpol.

Setelah melewati masa pendaftaran pada 18-20 Mei 2014 lalu, jelas bahwa ada dua kubu yang maju dalam pemilu Pilpres 2014 ini, yakni; Capres Joko Widodo dengan Jusuf Kalla dan Capres Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa. Dua kubu inilah yang akan bertarung dalam laga Pemilu Pilpres 2014 yang akan datang. Tentu saja akan banyak kampanye hitam yang akan menyeruak menyangkut pengungkapan sepak terjang kedua kubu ini dalam kaneh dunia politik.

## B. Permasalahan

Dari pemaparan di atas jelas, bahwa ada problematika besar pada tingkat kepercayaan pemilih (*voter*) dalam Pemilu terutama kepada Parpol peserta pemilu. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana rakyat sebagai voter memilih, terutama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar dalam beberapa ke depan? Apa dasar pemikiran dan pemilihan mereka? Apa imbasnya dalam konteks keamanan dalam negeri dikaitkan dengan kerja dan peran Polri sebagai aparatus Negara? Tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan perenungan dan acuan bertindak pada satuan Polri dalam pengamanan-pengamanan Pemilu ke depan dalam pemahaman konteks komunikasi politik di Indonesia ini.

## C. Kajian Teoritik Konvergensi Simbolik

### 1. Teori Konvergensi Simbolik

Teori Konvergensi Simbolik ini lebih dikenal dengan istilah analisis tema-tema fantasi yang dikembangkan oleh Ernest Bormann, John Cragen dan Donald Shields dengan menggunakan pola naratif dalam komunikasi. Inti dari teori ini diawali pada pandangan individu akan realitas yang dipandu oleh cerita-cerita yang merefleksikan bagaimana sesuatu itu dipercaya. Cerita atau tema-tema fantasi tersebut diciptakan melalui interaksi simbolik dalam kelompok kecil, dan kemudian dihubungkan dari satu orang ke orang lain dan dari satu kelompok ke kelompok lain untuk menciptakan sebuah pandangan dunia yang terbagi (Littlejohn and Foss, 2005:165).

Akar pemikiran Ernest Borman tentang teori konvergensi simbolik berangkat dari pemikiran Robert Bales (Griffin, 2006:39) tentang proses interaksi sosial kelompok kecil dalam konteks psikologi sosial. Pada kenyataannya dinamisasi pergerakan kelompok sangat penting sebagai pijakan dasar dalam evolusi kelompok. Pada kenyataannya memang metode kritik retorik teoritik konvergensi simbolik berada pada paradigma intepretif, namun disebutkan akar teoritik ini berasal dari paradigma obyektif, tentang metode analisis tema-tema fantasi yang digunakan pada kelompok kecil. Bormann (1985a) menemukan bahwa ada hubungan antara gambaran dramatik anggota kelompok ketika mereka bicara dengan derajat kesadaran (*consciousness*) kelompok dan solidaritas.

### 2. Teori Naratif

Penjelasan teori naratif yang paling komprehensif adalah yang dipaparkan oleh Fisher. Dipercaya bahwa rasionalitas manusia pada semua bentuk didasarkan pada esensi naratif. Konsekuensinya adalah komunikasi

dalam semua bentuk yang kemudian dipahami sebagai proses naratif. Tradisi naratif atau *story telling* (pola bercerita) telah dipandang sebagai sesuatu yang berbeda genre dengan argumentasi. Bercerita naratif dipandang sebagai sesuatu yang non rasional, sebaliknya berbeda dengan argumentasi yang dipandang lebih rasional. Argumentasi dipandang sebagai penuturan dengan pemesanan pada suatu perangkat premis-premis dan konklusi-konklusi berdasarkan spesialisasi aturan-aturan (Fisher, 1987:199).

Berbeda dengan pandangan tradisional, Fisher percaya bahwa naratif juga melibatkan rasionalitas. Naratif sebenarnya dapat digolongkan dalam tradisi rasionalitas yang didiversifikasikan. Argumentasi yang retorik dengan paradigma naratif ditujukan pada perluasan tipe-tipe rasional. Fisher meringkas bahwa cerita naratif tidak terbentuk dari diskursus yang utama karena bentuk argumentatifnya lebih menonjol. Bagaimana kasus dengan lugas diargumentasikan secara ilmiah menurut aspek filosofis dan sesungguhnya. Kasus diceritakan menurut intepretasi dari berbagai aspek dunia yang secara historis dan kultural mendalam dan tajam.

Persuasi terjadi ketika orang melihat ada alasan jelas untuk mengadopsi sebuah pandangan. Alasan terbaik adalah persuasi dapat dipresentasikan dalam bentuk alasan tradisi yang dipresentasikan dengan cara lain. Dalam paradigma naratif, nilai-nilai positif mengkonstitusikan bentuk ekspresi, seperti,

“Bila seseorang ingin mempersuasikan temannya untuk menerima pendapat tentang hak binatang dan penganiayaan hewan dalam keperluan industri. Mungkin anda akan membuat sejumlah alasan-alasan dasar mengapa binatang perlu dilindungi dan diadakannya karnaval dengan iring-iringan demonstrasi. Bila orang itu menerima nilai-nilai dari argumentasi tersebut, dia mungkin akan pergi ke karnaval tersebut dan

mendukung gerakan anti penggunaan binatang. Bisa jadi ia menerima argumentasi anda berdasarkan persuasi dan argumen-argumen formal yang ada. Bisa saja dari cerita kekerasan dan kekejaman tentang pemaksaan penggunaan binatang di laboratorium riset di Beagles". (Hasil riset yang dilakukan Fisher Walter pada tahun 1987 tentang *Human Communication*) (1987:49)

Memang cerita memiliki kemampuan luar biasa (*powerfull*) yang mencatat dan mempersuasikan untuk memberikan alasan-alasan pada presentasi pemikiran tradisional. Bagi Fisher, narasi adalah lebih dari cerita fiksi tradisional yang termasuk kategori verbal atau non verbal terhitung yang bersambung-sambung dari kejadian-kejadian yang menandakan makna untuk didengar. Paradigma naratif menggambarkan apakah orang akan melakukan ketika berkomunikasi. Namun naratif tidak mendikte, melainkan memberikan masukan apa seharusnya yang dilakukan secara tradisi argumen melalui debat.

Hal ini tidak berarti bahwa cerita itu efektif mengarahkan sikap orang, diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus untuk menceritakan (pola bercerita). Kemampuan membangun kualitas dari koherensi naratif yang tepat. Koherensi adalah derajat bagaimana cerita itu menjadi masuk akal dan merupakan perpanjangan makna. Koherensi diuji dan dipelihara oleh organisasi dan struktur cerita. Koherensi melibatkan 3 (tiga) jenis konsistensi. Pertama konsistensi internal yang menurut Fisher sebutkan koherensi argumentatif atau struktural. Ini adalah derajat yang menjelaskan bagaimana cerita dapat dikaitkan satu sama lain secara bersama. Kedua tipe koherensi eksternal, yang seperti Fisher sebutkan sebagai koherensi material. Kesamaan (kongruen) antara cerita ini dengan cerita lain, derajat cerita terlihat sempurna dalam bentuk kejadian sebelumnya yang dipelajari dari sumber-sumber lain.

Ketiga adalah koherensi karakterologis yang berangkat dari kepercayaan karakter-karakter dalam cerita, baik narator-narator maupun aktor-aktor. Karakter apa yang hendak dibuat dan nilai-nilai apa yang harus diekspos? Seseorang akan tahu perbedaan antara cerita yang baik dengan yang membingungkan. Orang dapat menyebut sebuah cerita yang masuk akal atau tidak. Cerita sedemikian diorganisasikan melalui pendekatan seni berbicara. Diakui bahwa unsur koherensi bukanlah segalanya dalam cerita. Dalam cerita kadang masih gagal dipersuasikan, karena tidak memuat kebenaran.

Kebenaran adalah kejujuran atau reliabilitas dari suatu cerita. Sebuah cerita memiliki kebenaran bila hal tersebut dilihat dari lingkaran kebenaran dari pendengar. Sebuah cerita dengan keberadaan kebenaran sebuah logika akan memberikan alasan baik dari perangkat nilai-nilai yang diambil menurut alasan-alasan pendengar. Di sini seseorang melakukan pembenaran pada 5 (lima) aspek naratif.

Pertama, cerita adalah sebuah kisah hikayat dari nilai-nilai. Kedua, nilai-nilai tersebut didekatkan dari moral cerita, keputusan dibuat oleh karakter-karakter atau tesis komunikasi oleh sebuah diskursus. Ketiga, nilai-nilai diterima dan memiliki konsekuensi-konsekuensi positif dalam hidup orang. Keempat, nilai-nilai dalam cerita konsisten dengan orang-orang memiliki pengalaman. Kelima, nilai-nilai adalah bagian dari visi ideal untuk menghubungkan pada sesuatu yang bernilai kemanusiaan.

### 3. Episode Kunci dan Tema Fantasi

Tema-tema fantasi adalah bagian dari drama-drama besar yang panjang dan rumit dari sebuah cerita yang dipaparkan dalam sebuah visi retorik. Sebuah visi retorik merupakan sebuah pandangan berbagi, bagaimana sesuatu terjadi dan apakah ada kemungkinan terjadi? Bentuk impian merupakan asumsi dari suatu pengetahuan kelompok yang didasarkan pada

penciptaan strukturasi penguasaan terhadap realitas. Tema-tema fantasi dan visi retorik, terdiri dari karakter-karakter, alur cerita, skenario dan sanksi dari agen (induk organisasi). Karakter dapat berupa pahlawan, penjahat atau hanya tokoh penunjang saja. Alur cerita adalah aksi atau pengembangan dari cerita.

Skenario merupakan settingan atau latar, termasuk lokasi perlengkapan dan lingkungan sosiokultural. Sanksi agen adalah suatu sumber yang melegitimasi cerita dan menjadi otoritas pada suatu kredibilitas cerita. Biasanya unsur ini diarahkan pada kepercayaan Tuhan. Sanksi agen biasanya merupakan sebuah komitmen pada keadilan, demokrasi atau bahkan kepercayaan.

Gambaran suatu kelompok dari para eksekutif akan tercapai bila dilihat dari pertemuan (*meeting*). Anggota akan berbagi pengalaman dan cerita-cerita tema fantasi yang membawa kelompok bersama. Beberapa akan diceritakan berkali-kali tentang organisasi dan anggotanya. Cerita biasanya memiliki pemain dan karakter-karakter, alur, skenario dan sanksi agen. Pada banyak kasus, sanksi agen akan diwujudkan oleh perusahaan itu sendiri. Cerita atau penceritaan kembali dari si pembuat cerita merupakan usaha nyata untuk pemeliharaan kohesi dalam kelompok.

Sebuah visi retorik biasanya dipaparkan secara berulang-ulang, sehingga tema tersebut menjadi begitu dikenal dan didiskusikan dalam kelompok khusus atau komunitas yang anggotanya kerap menceritakan keseluruhan episode. Tindakan ini akan menjadi 'pemicu' atau tanda simbolisasi suatu tema. Ketika visi retorik dilakukan semua eksekutif akan tertawa. Visi retorik dari kelompok yang berasal dari satu perguruan tinggi yang sama akan lebih cepat terpicu. Dengan demikian jelas bahwa, visi retorik akan mudah berbagi tema-tema fantasi bila berasal dari kelompok-kelompok yang khusus.

Tema-tema fantasi dikembangkan untuk tingkat yang lebih tinggi dari rasa kekeluargaan yang disebut dengan tipe-tipe fantasi (*stock situation*) yang biasanya disebutkan berulang-ulang dari kelompok yang ada. Sering kisah tersebut diceritakan kembali dan dihubungkan dengan nilai pribadi, kelompok atau komunitas untuk mendapatkan bentuk dari Saga. Mungkin setiap orang memiliki Saga dalam keluarga atau organisasi kerjanya. Misalnya jenis Saga Nasional atau komunitas yang ada di masyarakat. Seperti; George Washington dengan pohon Cherrinya dan John Hancock yang menandatangani Deklarasi Kemerdekaan dengan tulisan tangan yang indah, juga cerita keberhasilan Bill Gates dengan Microsoft-nya (Littlejohn, 2008:164).

Orang-orang saling berbagi tema-tema fantasi sebagai imbas dari penggunaan visi retorik. Tema-tema fantasi ini menarik dan secara bersamaan memberikan rasa identitas dengan realitas yang terbagi. Dalam proses ini orang mengkonversikan atau memegang gambaran yang mereka bagi dalam tema-tema fantasi.

Pada kenyataannya berbagi visi retorik, khususnya penggunaan tipe-tipe fantasi dapat menjadi peristiwa konvergen. Visi impian retorik dapat dibangun melalui berbagai tema-tema fantasi dalam kelompok. Visi retorik ini akan penuh rasa, fungsi dan penciptaan kesadaran-kesadaran. Visi retorik ini akan membuat orang menjadi sadar dan tentunya membuat sesuatu menjadi lebih masuk akal. Dengan kata lain visi retorik akan membangun atau memelihara kesadaran dari komunitas atau kelompok.

Visi retorik akan membuat masyarakat lebih kritis karena isinya menyebarluaskan diseminasi dan perasaan penuh kesadaran yang terus menerus dibangun (*Consciousness Sustaining*). Pada proses ini, tema-tema fantasi akan terbangun untuk berusaha menjaga komitmen. Dalam perusahaan, sebuah kesadaran terbagi

melalui visi retorik yang dapat mengadopsi loyalitas tanpa batasan gender, kebanggaan, dan komitmen. Visi retorik dapat mengadopsi tema-tema fantasi, nilai-nilai, dan tujuan implisit yang ada di dalamnya. Visi retorik bukan hanya berisi cerita-cerita naratif, tapi juga memiliki struktur yang dalam dan dapat merefleksikan juga mempengaruhi perasaan orang terhadap realitas. Contohnya cerita Bill Gates, berdasarkan pada impian apa yang didengar memiliki struktur terdalam dari individu istimewa, pekerja keras, sukses dan melakukan yang baik menurut pandangan dunia (Littlejohn, 2008). Bill digambarkan konsepsi tentang visi retorik akan seperti di bawah ini;



Gambar Proses Visi Retorik, Atribusi Makna dan Proses Konvergensi

Simbolik (Prisgunanto, 2011) Teori komunikasi konvergensi simbolik membagi 3 (tiga) bagian besar dalam berbagi tema-tema fantasi. Bagian pertama berhubungan dengan temuan-temuan dan perencanaan bentuk-bentuk komunikasi juga aplikasi dalam pengorganisasian yang pola-polanya disusun dan menunjukkan evolusi dari kesadaran yang terbagi. Bagian kedua terdiri dari deskripsi tendensi dinamis dalam sistem komunikasi yang menjelaskan, praktik observasi mengambil tempat. Proses dasar analog pada prinsip pengadaptasian dalam evolusi sebagai orang-orang yang bergerak dinamis (*dynamic people*) dan kerap melakukan upaya berbagi fantasi-fantasi kelompok. Bagian ketiga terdiri dari faktor-faktor yang menjelaskan kenapa orang berbagi fantasi, orang melakukan ketika mereka mau melakukan.

#### D. Pembahasan

Dalam pembahasan dari penarikan benang merah kajian teori konvergensi simbolik

jelas bahwa pola pemilihan dari voter bukan berdasarkan pada kepercayaan mereka kepada Parpol melainkan dari fantasi yang lekat pada sosok yang digunakan menjadi peserta Pemilu. Kekuatan sosok sedemikian hebatnya sehingga bisa membangun kehidupan politik Indonesia yang nyata-nyata sudah terpuruk dan penuh dengan kebangkrutan kepercayaan rakyat. Rakyat adalah pihak yang cerdas dalam memilih dan tidak bisa dibohongi lagi karena mereka memiliki suara yang tidak bisa tergadaikan begitu saja. Sikap yang terlalu memilih inilah yang menjadi dasar perlu adanya kelihaihan dari peserta Pemilu untuk membangun sosok yang dimiliki mereka. Tentu saja membangun identitas diri tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran pada sosok diri yang mereka miliki terlebih dahulu. Pola yang adalah dengan membangun dramaturgis dari sosok yang ada.

#### 1. Fantasi Kenegaraan

Para bakal calon Presiden dan Wakil Presiden mereka akan memainkan sosok diri mereka dengan membangun fantasi yang ada pada diri mereka dengan mendekati pada isu kebangsaan dan kenegaraan. Dalam nuansa kebangsaan dan kenegaraan yang akan menjadi titik sentral perhatian adalah nuansa kecintaan pada negara. Oleh sebab itu maka semangat nasionalisme menjadi kental dalam pelangiran isu-isu yang menjadi sentral titik tolak pengarahannya dari apa yang ada di benak orang. Satu yang disayangkan adalah kebanyakan orang

Satu yang perlu diingat, bahwa dalam kajian konvergensi simbolik ada beberapa unsur yang bisa menghidupkan organisasi, yakni; tema-tema fantasi, saga (hikayat), kelakar (*joke*), narasi (cerita-cerita/gossip), visi retorik, figur-aktor, atribusi makna (prisgunanto, 2011). Semua simbol tersebut akan mengkonvergensi kepada pemaknaan subyektif (*subjectives meaning*) kepada fantasi kelompok dalam organisasi yang ada. Dengan demikian jelas bahwa semua inilah

yang membangun organisasi dalam konteks iklim dan budaya kerja instansi.

Di sini dapat diartikan, bahwa organisasi memiliki fantasi bersama dengan adanya kontrak master (*master contract*) yang mewarnai lewat budaya organisasi institusi itu sendiri. Dengan demikian dalam Pemerintahan ada kesepakatan bersama tidak tertulis dengan tujuan yang hendak dicapai secara organisasi dan kesepakatan tersebut tercipta dalam konteks komunikasi organisasi.

Dijelaskan oleh Pacanowsky dan O'Donnell Trujillo bahwa konvergensi simbolik komunikasi menunjukkan bagaimana pola berbagi fantasi kelompok yang akan menyediakan episode-episode komunikasi kunci dengan penciptaan realitas yang lazim terjadi dengan dilengkapi dengan penciptaan perasaan bersama (Bormann, 1983). Dalam pemikiran tersebut sebenarnya ingin dipaparkan bahwa tema fantasi dalam komunikasi organisasi tercipta dalam nuansa komunikasi budaya organisasi yang muncul karena dipicu oleh episode komunikasi kunci (*key communication episode*). Satu yang sudah diketahui banyak orang bahwa episode komunikasi kunci yang dimiliki seorang Susilo Bambang Yudhoyono adalah mengundurkan diri dan keluarnya beliau dari Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Alasan pengunduran diri dari jabatannya karena beliau merasa tidak dipercaya lagi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Surat permintaan pengunduran tersebut terkirim kepada Presiden pada Kamis 11 Maret 2004 pagi, setelah sebelumnya ia menyurati presiden, mempersoalkan kewenangannya yang "dipreteli", namun tidak ditanggapi oleh Megawati. Di sinilah letak keberanian beliau dengan adanya seolah-olah perlawanan master kontrak

(*contract master*) dari kabinet Gotong Royong saat itu (<http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/susilo-b-yudhoyono/biografi/presiden.shtml>).

Memang sudah dipahami bahwa suksesi presiden sangat mungkin terjadi dengan tokohnya yang berangkat dari lingkungan dalam kabinet sendiri. Dapat dikatakan sangat jarang Presiden muncul dari bukan kalangan Kabinet, dan ini sudah terbukti di Indonesia ini semenjak presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Semua Presiden Indonesia memiliki kisah-kisah kunci episode komunikasi sendiri-sendiri yang unik yang semuanya berasal dari kalangan Pemerintahan sebelumnya, kecuali mungkin presiden Soekarno (karena sebelumnya jaman kolonial).

Dengan demikian jelas, ada ketakutan terbesar munculnya episode komunikasi kunci baru dalam reshuffle Kabinet bila dilakukan dalam beberapa waktu ini. Di sinilah peluang besar para Menteri untuk berlomba-lomba menciptakan sosok dan citra diri mereka sebelum terjadinya reshuffle Kabinet. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu begitu populer di masyarakat lewat "Iklan Pemilu damai" yang sebenarnya merupakan propaganda terselubung untuk mengakrabkan wajah dan sosok ke masyarakat. Cara-cara yang cukup elegan dalam konteks komunikasi organisasi budaya ini menciptakan episode komunikasi dengan narasi perlawanan terhadap pimpinan karena teraniaya dalam bidang kerjanya.

## 2. Pilihan Isu dan Pola Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Ada beberapa pilihan isu yang digelontorkan dalam saluran informasi media massa maupun digital terutama yang beredar dalam sosial media, seperti; facebook, tweeter, instagram dan lain-lain. Pilihan isu ini tidak

hanya bergerak sedemikian saja melainkan sejalan dengan adanya pengarahannya dari salah satu kubu dan pihak yang menjadi lawan politik mereka di laga Pemilu 2014 ini. Dalam keperluan ini digunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) model framing dengan menggunakan konsep Gamson and Modigliani. Dengan ringkas maka dapat dipilih 6 (enam) isu sentral yang kerap dibicarakan dalam forum dan pembahasan media massa dan sosial media yang ada. Diketahui isu-isu sebagai berikut:

a. Isu menarik adalah soal sensitif agama,

Isu pertama yang sangat hangat dibicarakan adalah menyoal agama dan kepercayaan yang dianut oleh Capres dan Cawapres yang mencalonkan diri dalam pemilu 2014 ini. Persoalan ini sangat pelik apalagi masih sangat kuat dan kentalnya isu ini dalam Pemilu di Indonesia. Isu sensitif yang diusung ini akan menentukan sikap memilih (*voter*) dalam menentukan pilihan mereka. Dalam ukuran kuantitas diketahui bahwa umat Islam di Indonesia sedemikian besar, sehingga ini adalah sebuah potensi kemenangan bagi Capres dan Cawapres. Capres dan Cawapres haruslah orang yang taat beribadah dan beriman dan yang lebih tepat lagi beragama Islam karena memang sedemikian yang diharapkan dalam pilihan kebanyakan rakyat Indonesia. Isu sensitif yang sangat berbau SARA dan primordialisme ini tetap tumbuh subur dan para Capres dan Cawapres harus memahami ini dalam pilihan mereka maju ke dalam panggung Pemilu 2014 ini.

Seperti pendapat mantan Presiden BJ Habibie sebagai berikut;

“Saya tidak bicara SARA. Tetapi dengan memperhatikan realitas sosial, tentu Presiden RI mendatang idealnya adalah tokoh yang beragama Islam karena kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam serta berasal dari suku Jawa karena mayoritas rakyat Indonesia

adalah orang Jawa. Tetapi asal suku tentu tidak mutlak harus Jawa,” katanya ketika dikonfirmasi oleh para wartawan (availabel at <http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/140204161004/limit/0/BJ-Habibie-Presiden-RI-2014-Idealnya-Beragama-Islam> [diunduh 27/5/2014. 21.30.23]).

Isu klasik ini tetap ada dan menjadi ukuran dan tolak ukur memilih dari voter dalam setiap Pemilu di Indonesia ini. Situasi sedemikian adalah wajar adanya pada tiap Negara dalam memilih pemimpin tertingginya. Misalnya saja Amerika Serikat dimana Negara ini sudah memiliki sistem demokrasi yang sesungguhnya sejak kurang lebih 200 tahun silam, tetap saja para pemilih (*voter*) tetap sedemikian memperhatikan dimensi suku, agama serta aspek mayoritas-minoritas. Dengan demikian tetap saja Capres dan Cawapres yang beragama Islam lebih akan dipilih daripada yang bukan karena sedemikian fanatiknya pemilih beragama Islam dalam pemilihan pemimpin nasional mereka. Pada kampanye Pilpres di negeri Paman Sam yang dianggap paling demokratis sendiri salah satu Capresnya dari Partai Republik bernama Mitt Romney benar-benar dilucuti informasinya oleh pers dan publik. Mulai dari kekayaannya, bisnisnya, sampai keluarganya termasuk agamanya. Memang sedemikianlah resiko menjadi calon pemimpin nasional.

Ketika diketahui bahwa Romney adalah seorang penganut Mormon, yang oleh kalangan Kristen mayoritas tidak diakui sebagai Kristen karena agama Mormon ini dianggap sempalan, alhasil menurunkan popularitas dan keinginan memilih *voter*. Padahal apa yang kurang dari sosok Romney ia seorang kulit putih, kaya raya, ganteng, dan terdidik karena alumnus Universitas Harvard. Pada Pilpres saat itu yang terpilih adalah Barack Obama dari Partai Demokrat meski berkulit hitam, ia beragama Protestan dan ini menjadi alasan kuat bahwa agama yang dipeluk Capres dan Cawapres tetap



menjadi patokan *voter* dalam memilih.

Pemilihan Cawapres atau pasangan sesungguhnya juga turut menjadi referensi haluan dari Capres yang diusung dan kepemimpinan ke depan. Apalagi dalam syariat Islam, Allah Ta'ala memerintahkan agar umat Islam tak menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan atau pemimpin mereka. Atas dasar itulah banyak di kalangan ulama maupun Da'i yang tergerak untuk menolak pemimpin dari kalangan non-muslim, meski dakwah yang bersifat tuduhan SARA banyak dianggap menyesatkan tetapi kebenarannya masih dipegang teguh.

Dalam banyak berita dan informasi diketahui, bahwa salah satu kubu Capres dan Cawapres yang bertarung dikatakan dan dibesarkan masih sangat minim dan kurang mendalami Islam dan ini menjadi isu paling santer dalam pertarungan Pemilu 2014 ini. Seperti tidak bisa sholat dan membaca AlQuran adalah isu-isu yang dijadikan senjata dalam kampanye hitam untuk menjatuhkan salah satu kubu pertarung Pemilu 2014, padahal ini tidak ada hubungannya dengan ketaatan seseorang dalam kehidupan politik.

#### b. Isu Peranakan Tionghoa

Isu sensitif lain yang paling kerap dibicarakan adalah masalah peranakan dan bukan peranakan. Memang isu terbesar bahwa Presiden harus berasal dari Jawa sedemikian kuat, dibandingkan dengan Presiden dari luar Jawa. Jangankan untuk menjadi Presiden sekedar Ketua Partai Politik saja juga harus mutlak berasal dari Jawa ini kelaziman yang ada dalam politik di Indonesia sejak dahulu (availabel at <http://nasional.sindonews.com/read/2014/03/06/18/841606/antropologi-capres> [diunduh 27/5/2014]). Isu ini pernah menjadi sangat sensitif sekali dalam kehidupan politik di Indonesia sejak pecahnya Malari dan Peristiwa Mei 1998 bersamaan dengan perubahan era dari Orde baru ke reformasi di Indonesia ini.

Kebencian pada peranakan atau keturunan Tionghoa di Indonesia bersamaan dengan adanya sentimen negatif pada sikap iri dan kebencian pada keberhasilan yang bisa diraih dalam bidang bisnis oleh saudara-saudara kita yang memang lebih ulet dan dibatasi kehidupannya dalam bidang Pemerintahan pada era Orde lama dan Orde baru dahulu. Pada kenyataannya kaum peranakan Tionghoa lebih berhasil karena mereka lebih ulet dan mau bekerja keras dalam usaha yang ditekuni.

Isu usang ini seperti sudah kurang populer apalagi sudah tidak ada lagi kaum peranakan imigran yang datang ke Indonesia. Kebanyakan mereka yang ada sekarang adalah hanya keturunan dan memang lahir di Indonesia, sehingga sudah menjadi penduduk asli sama dengan kaum pribumi. Dari sikap, adat dan cara berpikir sudah sangat pribumi, hanya warna kulit dan perawakan masih membawa garis keturunan dari unsur gen yang ada dalam tubuh mereka. Tentu saja unsur ini tidak bisa dihilangkan karena memang melekat dalam tubuh secara garis keturunan.

Namun tetap saja isu ini tetap menjadi menarik dan mereka yang sangat fanatik dan membenci keturunan peranakan Tionghoa akan menelan isu ini bulat-bulat dengan tidak memandang arah dan asal sumber dari isu negatif ini. Kondisi ini akan memperburuk stabilitas keamanan dan bisa memunculkan potensi konflik besar dalam masyarakat. Bahkan disinyalir bisa menimbulkan luka lama dan sejarah terulang dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Kita masih akan ingat pecahnya peristiwa Mei 1998 pasca penembakan sejumlah korban aktivis mahasiswa di Universitas Trisakti memunculkan aksi pengrusakan dan penjarahan di sana sini.

Diketahui bahwa sasaran pengrusakan, penjarahan bahkan sampai pada tindakan kriminal, yakni; pemerkosaan yang banyak

menjadi korbannya adalah dari pihak keturunan peranakan Tionghoa di Indonesia. Kondisi ini jelas dalam upaya merebut sikap simpatik dari sejumlah masyarakat yang memang membenci keturunan peranakan Tionghoa ini. Tentu saja kondisi ini memunculkan potensi konflik besar di masyarakat yang menjadi sejarah kelam dalam dunia perpolitikan di Indonesia ini. Meski diketahui di lain sisi ternyata sudah ada masyarakat yang kedewasaan berpolitiknya matang yang dibuktikan dengan sikap pro dan membela kaum peranakan Tionghoa menyadari bahwa potensi konflik anti peranakan Tionghoa bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan dan dibesar-besarkan, namun apabila selalu diekspos dan dibesar-besarkan secara berulang yang terjadi malah mengkerdikan masyarakat dalam memandang perbedaan dan kedewasaan pada dunia politik. Jelas kondisi ini tidaklah diinginkan ada usai Pemilu 2014 nanti.

Isu yang mengarah bahwa salah satu kubu Capres adalah keturunan Tionghoa merupakan bukti bahwa masih ada saja pihak yang ingin memunculkan isu sensitif ini yang sebenarnya sudah mulai ditinggalkan dan tidak populer di masyarakat. Meski pada kenyataannya ada sikap penolakan dan fakta autentik menyebutkan, bahwa Capres tersebut tidak terbukti peranakan Tionghoa namun tetap saja menjadi label yang kuat pada sosoknya. Tentu saja yang ditakutkan keusangan dari isu ini akan memudar bila informasi ini terlalu digembar-gemborkan pada Pemilu 2014 ini dan ini bisa menjadi titik kemunduran dari perkembangan dan kedewasaan berpikir politik bangsa ini.

### c. Isu Pelanggar Hak Asasi Manusia Berat

Negara Indonesia menjunjung Hak Asasi Manusia, dan hal tersebut dibuktikan dengan termaktubnya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia*

*harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,*" Dengan demikian jelas bahwa hak manusia yang paling dasar saja dalam konteks kemerdekaan dibela dan dilindungi oleh Negara Indonesia. Konteks ini semakin meyakinkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan ini sejalan dengan tujuan piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Universal Human Rightnya.

Isu yang paling santer adalah menyoal penculikan sejumlah aktivis 1997/1998 yakni peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap, yakni; menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul (<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menju-ri-1/14/05/08/n57064-lsm-ungkit-lagi-pelanggaran-ham-prabowo>).

Meski isu ini tidak terbukti tetapi nyata kerap dikaitkan dengan salah satu kubu Capres dengan gerakan tim Mawarnya di bawah Komando Pasukan Khusus tempat beliau pernah berdinasi di sana. Penculikan yang menyeret 11 anggota Tim Mawar ke Pengadilan Mahkamah Militer ini kemudian memecat komandan Tim Mawar Mayor Bambang Kristiono dan empat anggota lainnya. Enam anggota hanya ditahan tanpa dikenai sanksi pemecatan. Terkait kasus ini, sang Capres pernah diseret ke Dewan Kehormatan Perwira dan diputuskan bersalah meski pada informasi selanjutnya hasil proses

peradilannya sudah selesai dan ditutup.

Namun tetap saja ada sikap ketakutan dan kengerian dalam pemilihan Capres dan Cawapres yang bisa saja terjadi dalam masa Pemerintahannya. Hal ini beralasan apalagi bila dikaitkan dengan sejarah panjang bangsa Indonesia yang kelam dalam dunia politik. Perlawanan isu anti demokrasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah memang Capres yang satu ini anti demokrasi dan akan mengembalikan masa-masa kelam dahulu mertuanya (yang tidak lain adalah alm. H. Soeharto mantan Presiden RI kedua) bila menjabat nanti. Tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan dan malah memojokkan salah satu kubu dalam Pilpres 2014 ini. (availabel at <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078493032/Pelanggaran-HAM-Wiranto-dan-Prabowo-Berbeda-Sikap> [diunduh 27/5/2014. pukul. 11.23.2])

#### d. Isu Keluarga

Pemerintah Orde baru sedemikian kuat dan langgeng karena pola pemerintahan yang berkonsep keluarga. Pemahaman keluarga jangan hanya diartikan menyoal hubungan darah dan pertalian perkawinan dalam dinasti keluarga saja, melainkan lebih daripada itu adalah Pemerintahan yang berparadigma keluarga. Mungkin banyak orang menganggap keluarga hanyalah sesuatu yang sepele dan tidak ada hubungannya dengan urusan pengelolaan Negara yang besar dan kompleks. Padahal peribahasa Cina kuno menyebutkan bahwa untuk "*Mengenali seseorang cukup hanya dengan mengenali keluarganya saja*". Berbeda dengan itu orang Amerika juga berperibahasa konteks keluarga dengan menyebutkan, "*Buah Apel tidak jauh dari pohonnya*".

Keluarga merupakan institusi terkecil, dimana seseorang bisa belajar untuk memahami status dan peran mereka dalam bermasyarakat. Mulai dari pemahaman gender, kekuasaan,

tanggungjawab hingga kultur yang melingkupi kehidupan mereka. Dari sanalah terbentuk hubungan bapak dan anak yang bukan sekedar hanya hubungan *Patron - klien* (atasan - bawahan), seperti layaknya berlaku dalam sebuah organisasi formal. Hubungan bapak dan anak lebih agung dan penuh loyalitas satu dengan yang lain. Artinya sang Bapak akan berhasrat mengayomi sang anak dan sebaliknya sang anak harus berbakti tanpa batas tanpa pamrih kepada orangtua. Sang akan anak melakukan tugasnya dalam upaya membalas budi terhadap orang yang telah membesarkan dan membina mereka agar bisa berbaur dan hidup layak di masyarakat.

Dalam konteks pengaturan (*governance*), tentu saja keluarga juga mempunyai tata aturan, baik yang tertulis maupun tidak. Tiap keluarga memiliki keunikan dan tata aturan sendiri yang semuanya akan membentuk masyarakat, kemudian kumpulan masyarakat akan membentuk Negara. Dengan demikian jelas, bahwa keluarga adalah satuan terkecil dalam struktur masyarakat yang sedikit banyaknya mampu memengaruhi kehidupan masyarakat yang lebih besar lagi, yakni; Negara. Oleh sebab itu benar pendapat yang menyebutkan, bahwa Negara bisa menjadi kuat karena keluarga-keluarga yang ada di dalamnya kuat.

Menurut Samovar (2004:118-119) keluarga akan sangat dipengaruhi oleh kultur yang melingkupinya. Pada keluarga yang berkonteks individualistik akan sangat kentara pada gambaran keluarga di negara Barat atau Eropa, dan lebih kentara di Amerika Serikat dengan konsep keluarga nuklir pada era industrialisasi. Keluarga yang digambarkan liar, tidak disiplin dan membanggakan garis keturunan. Namun pada beberapa dekade ke depan konsep modern berkembang menjadi keluarga yang terisolasi nuklir, dimana keluarga terbangun merdeka (*independen*) dan otonomi individu. Anak-anak dapat memberikan keputusan untuk dirinya sendiri, melakukan sendiri dan memecahkan dan

mengerjakan segala sesuatunya secara mandiri. Orang tua memberikan tanggungjawab dan kepercayaan diri penuh kepada anak-anaknya.

Keluarga dalam konteks individualistik hubungan antar keluarga dianggap fungsi yang terbagi dan berperan sejajar. Interaksi dianggap sebagai sebuah sistem, dimana transfer peran adalah yang utama. Tidak ada pihak yang lebih unggul untuk berkuasa penuh atas keputusan dan kebijakan. Semua sama, setara dan tidak ada batasan. Peran manusia dilihat dari kemampuan dan keandalan yang masuk dalam konteks profesionalisme. Keputusan diambil perseorangan dengan asumsi kebersamaan dengan mengambil suara terbanyak atau dominan (*voting*). Kepala keluarga hanya berfungsi simbolis bukan pemilik atas kekuasaan dan pengambil keputusan yang absolut.

Berbedadenganitu,keluargayangberkonteks kolektivistik lebih digemari oleh masyarakat Asia. Model tersebut mengklaim hubungan antar keluarga didominasi oleh unsur patrilineal (garis bapak) dan hilangnya kepemilikan pribadi. Sentral kebijakan dan keputusan ada di tangan Bapak dan semua pihak harus tunduk pada mereka-mereka yang dianggap berusia lebih tua. Dengan demikian, model tersebut terkesan jauh dari sistem keterbukaan dan demokrasi, sehingga diidentikkan dengan wujud pengaturan dan kontrol otoriter yang absolut. Oleh sebab itu muncullah stereotipe bahwa orang Asia pasti jauh dari sifat demokratis, sebab dalam hidup keluarganya penuh dengan praktik kediktatoran dan trik otoriter absolut.

Dalam pemahaman dinasti keluarga, jelas orang timur tidak mungkin melepaskan pemahaman itu dalam konteks Pemerintahan. Pertalian darah dan hubungan keluarga begitu lekat dengan kewenangan dan pengaturan dalam organisasi, seperti layaknya dinasti dalam struktur kerajaan. Tradisi keluarga yang lekat dalam Pemerintahan mengaburkan makna

dinasti di sebagai penerapan bentuk sistem hirarki atau benar-benar keluarga dalam konteks sedarah dan sekandung. Oleh sebab sedemikian kentalnya makna keluarga dan dinasti dalam Pemerintah disadari sedemikian sulit bila memisahkan keduanya, apalagi menyebutkan bahwa dinasti keluarga adalah sesuatu yang haram dalam organisasi Pemerintahan, sebab Pemerintah tidak mungkin tidak menyisipkan konteks keluarga dalam tata pengaturan dalam konteks komunikasi organisasi.

Isu salah satu Capres memiliki kehidupan keluarga yang kurang beruntung menunjukkan bahwa beliau masih kurang pantas dipilih dalam pertarungan Pilpres mendatang. Indikasi bahwa keluarga adalah cerminan orang dalam berpolitik setidaknya melekat erat pada perspektif orang Indonesia. Keberhasilan dalam kehidupan berkeluarga bisa menjadi ukuran bagaimana mereka mengelola kehidupan dan kepemimpinan kelak (availabel at <http://www.islampos.com/prabowo-subianto-siapakah-dia-111223/>[unduh 27/5/2014.Pkl. 23.59.1]).

#### e. Isu Ketidakbecusan Memimpin

Isu yang tidak kalah menarik tentang kepemimpinan yang kuat dan tegas. Ketidakmampuan tetap mendominasi pada ketidakpercayaan voter dalam memilih Capres dan Cawapresnya. Ketika ada kemampuan dan pengalaman lebih penting daripada sekadar umur karena bercermin dari Negara lain diketahui bahwa Pemimpin Negara berusia lebih tua dan tidak sekedar instan muncul di publik. Pernyataan yang menyindir dan menyerang salah satu kubu ini cukup santer karena pernah dilontarkan oleh pasangannya sendiri. Keraguan pada sosok kepemimpinan adalah biasa dalam Capres Pilpres yang ada (availabel at <http://nasional.inilah.com/read/detail/2103813/hancur-kita-kalau-jokowi-jadi-capres#.U4U4ZHYrcwo> [diunduh 19/5/2014]).

Pernyataan ini bukan main-main dan bisa

menjatuhkan salah satu Capres bahkan terindikasi pada ketidakpercayaan kepemimpinan. Memang di masyarakat Asia pengalaman adalah yang utama daripada kemahiran, orang akan lebih percaya kepada mereka yang memiliki pengalaman dan usia tua daripada yang muda. Di satu sisi jelas bahwa golongan muda adalah mereka yang digambarkan terburu-buru sering mengambil tindakan sendiri dan cenderung sembrono. Berbeda dengan golongan yang tua karena pengalaman mereka akan hati-hati dan tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan penting. Kondisi inilah yang akhirnya bermuara bahwa orang tua dan berpengalaman lebih bisa diandalkan menjadi pemimpin daripada yang muda.

#### f. Isu Korupsi dan Kekayaan

Isu menarik saat ini adalah menyoal harta kekayaan dan aksi korupsi yang mungkin dilakukan oleh Capres atau Cawapres tersebut. Penggunaan sarana dan prasarana mahal akan merujuk pada sumber kekayaan yang ada. Tentu saja kekayaan menjadi ukuran pada kebecusan dalam memimpin (<http://www.solopos.com/2014/05/16/pilpres-2014-kpk-ingatkan-capres-dan-cawapres-laporkan-kekayaan-508133> [diunduh 21/5/2014.22.2.2]).

Ada pelaporan pada bukti tindakan korupsi setidaknya memberikan bukti bahwa salah satu Capres terlibat pada tindak pidana korupsi yang terjadi dan ini sangat sensitif berdampak pada voter. Apalagi bila dikaitkan dengan masa jabatan sebelumnya Capres yang dihubungkan dengan dampak kemiskinan yang akan terjadi. Sorotan tajam pada kedua Capres jelas terlihat ketika semua kekayaan harus dilaporkan dihubungkan dengan jabatan terdahulu mereka yang disinyalir ada praktik tindak pidana korupsi di dalamnya.

### 3. Episode Kunci

Manusia adalah mahluk bercerita (homo

narans) yang penuh dengan kisah-kisah di kepalanya dalam menafsirkan sesuatu. Oleh sebab itu manusia akan menjahit kisah-kisah itu dengan perantara pers dan sosial media, melalui kisah tersebut akan mengarahkan dan mengerucut pada sikap memilih dan pilihan voter dalam Pemilu. Proses sedemikian begitu lama bahkan harus mengakar dahulu di masyarakat, bukan hanya sebentar dan instan adanya. Publik akan menilai sejujur-jujurnya dan subyektif karena memang pilihan sangat tergantung kepada cara pandang mereka akan sesuatu.

Ada beberapa episode kunci yang digunakan publik untuk memilih calon pemimpinnya. Pertama kita melihat bagaimana kisah dipanggilnya Soeharto selaku wakil pihak militer ke Istana Bogor oleh Presiden Soekarno dan sesampainya di sana setelah diberikan nasihat, kemudian Soeharto diberikan baju dalam dan ini ditafsirkan dengan penyerahan kekuasaan dari Pemerintah lama dan baru. Episode kunci tersebut diyakini dan akhirnya dukungan kuat mengarah kepada Soeharto bukan pada Presiden sebelumnya.

Demikian juga dengan kegerahan Orde Baru dengan keberadaan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang didirikan oleh BJ Habibie semula diwaspadai akan membina kekuatan besar dan melakukan revolusi oleh penguasa waktu itu. Apalagi ada gambar gembor sebagai lawan tanding dari keberadaan CSIS yang merupakan poros kekuatan pemikir dari Amerika Serikat tersebut. Kecurigaan dan ketakutan ini akhirnya malah berbuah pada dukungan kuat pada BJ Habibie yang akhirnya memuluskan menjadi RI satu pasca Orde baru. (<http://entertainment.kompas.com/read/2011/06/12/18583996/Habibie.Pernah.Ditantang.Soeharto> [diunduh 26/5/2014. Pkl. 5.23.2]). Inilah kisah episode kunci yang menjadi referensi orang untuk pro pada Habibie. Namun sayangnya pada selanjutnya ada kritik

bahwa kedudukan BJ Habibie membentuk ICMI hanya menguatkan Soeharto sebagai Pemimpin Nasional.

Kehadiran Abdurahman Wahid yang mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia cukup merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah. Perlawanan Abdurahman Wahid pada Pemerintah terlihat dengan tidak mau bergabungnya ia ke dalam ICMI. Perlawanan inilah yang menjadikan orang malah berbalik memihak Abdurahman Wahid dan dianggap sebagai episode kunci dalam pemilihan oleh voter. (Barton, 2002).

Penculikan para aktivis dan gambar-gambar reformasi membawa pada keberpihakan bahwa negara demokrasi bukan hanya Islam sehingga keberpihakan menuju pada Megawati sebagai pihak yang mengusung pro demokrasi. Setelah masa Abdurrahman Wahid yang terjadi malah berganti malah orang banyak berpihak pada Megawati (availabel at <http://www.oocities.org/injusticedpeople/PertarungandiMPRBelumUsai.htm> [diunduh 20/5/2014]). Di sinilah letak episode kunci dalam pemilihan Presiden bagi bangsa Indonesia.

Pergantian dari Presiden Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono diawali dengan pengunduran dirinya dari Menko Polkam pada Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Presiden Megawati. Kondisi ini malah berganti pada keberpihakan kepada kepada Susilo Bambang Yudoyono sehingga memuluskan jalan menuju RI 1 (availabel at <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/12/nas1.htm> [diunduh 23/5/2014.23.11.01]). Itulah episode kunci terpilihnya para Presiden Indonesia.

Bagaimana dengan Capres saat ini tentu saja voter tinggal menunggu episode kunci yang masuk akal dan bisa dijadikan patokan mereka untuk yakin memilih Presiden yang akan datang. Keyakinan itu akan muncul dari

bagaimana mereka menjahit kisah-kisah yang ada dan diakhiri dengan episode kunci yang menjadi titik rujukan mereka dalam memilih. Di sinilah titik keberhasilan Capres dan Cawapres untuk memenangkan Pemilu Pilpres 2014 ini. Sayangnya kerap pemilihan episode kunci ini bisa menyinggung dan berbenturan dengan kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian dapat dipastikan bisa menjadi potensi dan pecah konflik yang akan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Hal inilah yang perlu diwaspadai dalam melihat pergeseran-pergeseran yang dalam kemungkinan perpecahan oleh aparat kepolisian sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum.

#### 4. Keamanan dan Politik

Penggelontoran pada isu-isu sensitif dalam kampanye hitam Capres dan Cawapres akan menimbulkan gesekan-gesekan dan benturan yang besar dan berpotensi menciptakan konflik di masyarakat. Dapat diibaratkan bahwa isu-isu negatif yang muncul dan memojokkan salah satu kubu akan menimbulkan perpecahan dan saling serang dan menyerang antara satu kubu dengan yang lain. Situasi ini akan semakin keruh bila tidak ditanggapi dengan kepala dingin oleh Capres dan Cawapres dalam menentukan tujuan mereka bertarung dalam Pemilu ini. Jelas sikap kedewasaan mutlak diperlukan dalam menentukan laga mereka di medan pertempuran pemilu 2014 ini.

Perlu adanya sikap kedewasaan berpikir dalam berpolitik bagi semua pihak terutama oleh Capres dan Cawapres. Pemilu ini tidaklah hanya melulu untuk keperluan kemenangan dalam suara melainkan pendewasaan berpikir bagi pemilih (*voter*) khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemilu adalah proses masyarakat menjadi sadar akan kebutuhan mereka akan politik, bukan malah sebaliknya membuat mereka membenci dan ketakutan berlebihan (*paranoid*) pada politik. Jalan panjang sejarah

politik Indonesia yang kelam yang diawali masa kolonial Belanda dahulu sampai ke Orde Baru menunjukkan adanya 'keterkekangan' masyarakat ketika berbicara politik. Bagi mereka politik bukanlah sesuatu yang 'seksi' dan bermanfaat melainkan harus dihindari dan dijauhi.

Sikap ketakutan berlebihan akan politik dan jelas politik itu kejam adalah yang melekat di benak masyarakat. Artinya menjadi pelaku politik harus kejam dan tidak manusiawi dalam melakukan manuver politik. Menghilangkan ketakutan masyarakat inilah kunci dari keberhasilan kehidupan politik di Indonesia. Jangan sampai malah kehidupan politik mengalami kebangkrutan dan kepercayaan rakyat. Panggung politik adalah dagelan berbeda dengan panggung hiburan yang lebih masuk akal dan bisa membuai masyarakat. Pertanyaannya bisa tidak dunia politik di Indonesia ini memfantasikan orang dalam berpolitik dan bernegara yang sesungguhnya.

Di sinilah letak dilematisnya aparat keamanan dalam menjaga dan mengawal kehidupan politik di Indonesia ini. Aparat seperti Polisi harus tegas dalam menentukan sikap di lapangan yang berhubungan dengan urusan Pemilu dengan tidak memandang berat sebelah pada salah satu kubu politik. Belum lagi daftar panjang dari sejarah kelam politik di Indonesia ini yang membuat mandek keterbukaan politik pada masyarakat. Dalam melakukan tindakan pengamanan dan penegakan hukum tentu saja Polisi sebagai aparat keamanan harus berada di garda depan dengan mengedepankan sikap humanistik dalam operasi kerja mereka. Polisi sebagai aparat Negara seharusnya menjaga dunia politik mereka dalam upaya mewujudkan kehidupan demokratisasi yang sesungguhnya.

Ada banyaknya isu-isu negatif sensitif yang ada di atas semakin menunjukkan bahwa begitu besar dan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh polisi dalam penegakkan hukum

dalam praktik politik praktis. Sikap mewaspada pada tiap-tiap tema perpecahan konflik di atas menjadi pilihan sikap dalam menindaklanjuti kemungkinan pecah konflik besar yang mengganggu keamanan dalam negeri. Kondisi inilah yang harus dipahami betul oleh polisi karena kerja mereka tidaklah rutin penjagaan keamanan dalam pemilu 2014 saja melainkan sikap reaktif menyikapi kemungkinan pecah konflik selanjutnya di Pemilu ini. Isu negatif yang ada dalam pengamanan Pemilu Pilpres ini adalah minimnya anggaran yang disediakan sehingga ada kemungkinan kurang optimalnya pelaksanaan di lapangan dalam praktiknya.

### E. Kesimpulan

Banyaknya isu yang beredar dan bisa dirangkai menjadi episode kunci adalah jawaban dari pengamanan kewaspadaan pengamanan pada pemilu 2014 ini. Pemilih akan menganalisis dan menilai dengan cermat semua kisah yang ada dalam pemberitaan maupun cerita di sosial media. Tentu saja akan ada pihak yang kalah dan menjadi pecundang dalam Pemilu Pilpres ini, dan ketakutan terbesar pecahnya konflik besar di Indonesia karena Pemilu Pilpres 2014. Aparat kepolisian harus bisa bersikap bijak dalam mengambil tindakan tidak gegabah dan terlalu represif dalam menindak karena akan terkesan bahwa polisi berpihak pada salah satu kubu secara tidak langsung dan ini bisa menjadi pemicu konflik pada selanjutnya.

Ada indikasi perguliran isu dari yang ada semula mengarah pada salah satu kubu ketika itu tidak berhasil akan mengarah kepada aparat keamanan yang dianggap kurang mampu melakukan tindakan pengamanan dan penegakkan hukum yang ada dalam rangka pengupayaan pengamanan dalam negeri. Istilah yang kerap ada adalah polisi kerap menjadi buangan sampah dan pengalihan kekesalan dan kebencian karena isu-isu yang ada tadi. Apalagi polisi kerap dianggap sebagai representasi nyata

Negara ketika hadir di masyarakat. Alhasil ketika rakyat benci pada Negara pelampiasan akan ditujukan pada polisi dan di sinilah sikap bijak pimpinan Polri dalam menanggapi episode kunci yang teryakini akan bermuara pada pelimpahan target sasaran pada kerja aparat keamanan, terutama kepolisian.

#### Daftar Bacaan

Barton, Greg (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. Singapore: UNSW Press

Bormann, Ernest (1983a). Symbolic convergence: Organizational communication and culture. In L. L. Putnam & M. E. Paeanowsky (Eds.), *Communication and Organizations*. Beverly Hills, CA: Sage.

Fisher, Walter. R (1987). *Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value and Action*. Columbia: University of California press.

Griffin, EM (2006). *First Look at Communication Theory, 6th ed.* Boston: Mc Graw Hill.

"Jusuf Kalla Usulkan Lomba Baca Alquran Antar Capres," (availabel at <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menju-ri-1/14/05/26/n66bm4-jusuf-kalla-usulkan-lomba-baca-alquran-antar-capres>).

Littlejohn, Steven W (2008). *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth.

"LSM Ungkit Lagi Pelanggaran HAM Prabowo," (availabel at <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menju-ri-1/14/05/08/n57064-lsm-ungkit-lagi-pelanggaran-ham-prabowo>)

co.id/berita/pemilu/menju-ri-1/14/05/08/n57064-lsm-ungkit-lagi-pelanggaran-ham-prabowo )

"Pilpres 2014 : KPK Ingatkan Capres dan Cawapres Laporkan Kekayaan," (availabel at <http://www.solopos.com/2014/05/16/pilpres-2014-kpk-ingatkan-capres-dan-cawapres-laporkan-kekayaan-508133>).

Prisgunanto, Ilham (2010). "Dinamika Berbagi Fantasi Pada Jamaah Islam Jamaah Tabligh," (*Disertasi PPs Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran*).

"Siapakah Jokowi Sebenarnya?" (availabel at <http://www.suara-islam.com/read/index/5408/Siapakah-Jokowi-Sebenarnya>)

Samovar, Larry. A and Richard E. Porter. 2004. *Communication between cultures*. 5th.ed. Belmont: Wadsworth.

"SBY Mundur, Mega Tersenyum: Jawaban Diberikan Secepatnya," (availabel at <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/12/nas1.htm>).

"Tahukah Anda: Prabowo Subianto, Siapakah Dia?," (availabel at <http://www.islampos.com/prabowo-subianto-siapakah-dia-111223/>).

Thohari, Hajriyanto. Y. "Antropologi capres," (availabel at <http://nasional.sindonews.com/read/2014/03/06/18/841606/antropologi-capres>).

"Wawancara TV JK: Hancur Kita Kalau Jokowi Jadi Capres," (availabel at <http://nasional.inilah.com/read/detail/2103813/hancur-kita-kalau-jokowi-jadi-capres#.U4U4ZHYrcwo>)